

Nomor : B/65/AA.05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**

23 Desember 2025

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251219YUWR
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa nilai sebesar **72,35** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Utara;
4. Bupati Tana Tidung.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251219YUWR
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Komponen Penilaian LHE			Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/ Progres Penyelesaian	Ket. (Link Dokumen)	Eviden
No.	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
A. PERENCANAAN KINERJA												
1.	Penjenjangan kinerja yang disusun sebagai konsep dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja masih belum sempurna. Masih ditemukan beberapa kondisi kinerja di level taktis dan operasional beserta indikatornya yang belum cukup dalam mengawal kinerja diatasnya, sehingga CSF yang dimiliki masih perlu digali lagi;	Instansi disarankan untuk mengidentifikasi ulang CSF dengan mempertimbangkan bukti empiris, tren kinerja, akar masalah, dan variabel-variabel kritis yang mempengaruhi pencapaian hasil. Perbaikan ini diperlukan untuk memastikan CSF benar-benar menjadi dasar fokus intervensi.	Penjenjangan kinerja yang disusun sebagai konsep dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk level strategis dan taktikal serta operasional masih perlu penyempurnaan	Tim SAKIP KTT membedah kembali Penjenjangan Kinerja yang belum maksimal mengungkit Kinerja diatasnya.	Persentase Kinerja Strategis, Taktikal dan Operasional dalam Pohon Kinerja dan Cascading Daerah yang dibedah	100%	Rapat Pembahasan Pohon Kinerja dan Cascading Oleh TIM SAKIP bersama Bidang Perencanaan di Bappeda	Februari 2026	Bidang P2EP Bappeda (Erwin, S.Kom)	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1u2F5XN0Zz7WHkJUuhM5Wcf3VM3YtIE4m2us?usp=sharing	Undangan Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi daftar Hadir
2.	Kinerja lintas sektoral yang dimiliki masih fokus lintas kepada OPD dan belum melihat kinerja lintas sektoral bersama instansi vertikal maupun pemangku kepentingan yang mempunyai dampak dalam mendukung capaian kinerja OPD maupun Instansi;	Instansi agar memetakan kembali kinerja lintas sektor dengan tidak hanya melihat pada lintas OPD saja. Namun dengan pemangku kepentingan lain yang menjadi faktor dalam mendukung kinerja.	Kinerja lintas sektoral yang dimiliki masih fokus lintas kepada OPD	Melakukan pemetaan ulang crosscutting kinerja dengan melibatkan stakeholder terkait lintas OPD termasuk Instansi Vertikal guna memastikan dukungan pencapaian sasaran kinerja secara terpadu.	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pencapaian Target Kinerja Daerah	36 Stakeholder (OPD, Instansi Vertikal, dan Perusahaan)	Rapat Pembahasan Pohon Kinerja dan Cascading Oleh TIM SAKIP bersama OPD, Instansi Vertikal, dan Perusahaan	Februari 2026	Bidang P2EP Bappeda (Erwin, S.Kom)	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1RUQwr8LN51tgcJWG3Vf85Qv6EQhYnY8-7usp=sharing	Undangan Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi daftar Hadir
3.	Penetapan target dan kualitas rencana aksi masih perlu dilakukan penyesuaian. Aktivitas yang ditanamkan dalam renaksi belum sepenuhnya dirancang, dengan memperhatikan permasalahan dan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, aksi yang ada banyak dituangkan pelaksanaannya di semester 2 sehingga efektivitas pengendalian dan risiko ketidakcapaian renaksi berpotensi tinggi.	Setiap OPD perlu menata ulang jadwal rencana aksi agar terdistribusi secara merata pada setiap triwulan, tidak hanya menumpuk di semester II. Tindakan yang dilakukan wajib memastikan mengikuti tahapan waktu yang jelas untuk pengendalian kinerja dan mitigasi risiko keterlambatan dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, Setiap OPD juga harus memastikan bahwa setiap tindakan diturunkan langsung dari masalah yang ingin diselesaikan dan diarahkan pada hasil. Aksi yang tidak menunjukkan hubungan logistik dengan akar masalah perlu direvisi atau dihilangkan.	Perumusan dan Penetapan target dan kualitas rencana aksi masih perlu dilakukan penyesuaian.	Menyusun jadwal rencana aksi agar terdistribusi merata setiap triwulan serta memastikan setiap aksi memiliki keterkaitan langsung dengan outcome dan mitigasi risiko keterlambatan.	Persentase capaian pelaksanaan renaksi yang sesuai jadwal yang berbasis outcome	90%	Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan	April, Juli, Oktober, Desember 2026	Bidang P2EP Bappeda (Erwin, S.Kom)	TW1 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1_a0m07FmVAnhrWAAc6QkZapq-Mykdy?usp=sharing	Undangan Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi daftar Hadir
B. PENGUKURAN KINERJA												
1.	Tingkat capaian pengisian dalam sistem pengukuran kinerja belum optimal. Informasi akan realisasi, masalah, Upaya yang akan dilakukan dan rencana tindak lanjut masih belum diinformasikan dalam mekanisme movev yang ada di sistem	Instansi perlu mendorong kepatuhan seluruh OPD dalam menginformasikan kemajuan pencapaian dan kewajiban setiap OPD agar mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat sebagai bagian dari setiap siklus pengukuran kinerja. Hasil identifikasi tersebut harus digunakan untuk menyusun langkah korektif dan perbaikan strategi agar pengendalian kinerja lebih efektif.	1. Tingkat capaian pengisian dalam sistem pengukuran kinerja belum optimal. 2. Monitoring pengendalian capaian kinerja belum dilakukan secara optimal	Melakukan pengendalian terhadap pelaporan kinerja setiap triwulan dan Mendorong seluruh OPD untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja serta menyusun langkah korektif sebagai bahan pengendalian kinerja.	Jumlah Rapat Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	4 Kegiatan	Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan	April, Juli, Oktober, Desember 2026	Bidang P2EP Bappeda (Erwin, S.Kom)	TW1 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1uWvYwQeZT8uH_qUcClxVQjSAVpmk7usps-haring	Undangan Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi daftar Hadir
2.	Monev ketercapaian kinerja lintas sektoral yang sudah dipetakan belum spesifik di informasikan. Sehingga kontribusi yang diharapkan dalam mendukung kinerja yang di lintas sektoral tidak bisa diukur realisasi dan dampaknya;	Mendorong pemantauan ketercapaian kinerja lintas sektoral dengan tidak hanya menginformasikan apakah kinerja tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Tetapi juga dengan memberikan informasi mengenai kemajuan, kendala, dan efektivitas dampak dari fokus intervensi yang dilakukan selama lintas sektoral;	Monev ketercapaian kinerja lintas sektoral yang sudah dipetakan belum spesifik di informasikan.	Melakukan pengendalian terhadap pelaporan kinerja (Lakin) setiap triwulan dan melaporkan tahapan kinerja dengan melakukan pengisian laporan kinerja sesuai dengan kondisi riil serta Mengembangkan mekanisme monitoring crosscutting yang memuat informasi progres, kendala, dan efektivitas intervensi terhadap pencapaian kinerja.	Jumlah Rapat Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	4 Kegiatan	Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Triwulanan	April, Juli, Oktober, Desember 2026	Bidang P2EP Bappeda (Erwin, S.Kom)	TW1 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1HPNv4h8x89HOEKD1g83BduNNd2LW0J2usp=sharing	Undangan Rapat Dokumentasi Rapat Notulensi daftar Hadir
3.	Instansi belum memiliki mekanisme pemeriksa kedua (internal reviewer) atau komite validasi data yang bertugas memastikan kualitas data pada saat pengukuran kinerja dilakukan. Ketidadaan fungsi validasi ini meningkatkan risiko kesalahan, inkonsistensi, dan rendahnya kebugaran data yang digunakan untuk evaluasi kinerja.	Instansi perlu membentuk mekanisme pemeriksaa kedua atau komite validasi data (Bappeda atau Bagian Organisasi) secara formal untuk memastikan setiap kinerja data sebelum izin. Proses validasi harus mencakup pengecekan sumber data, keakuratan perhitungan, dan konsistensi resolusi indikator.	Instansi belum memiliki mekanisme pemeriksa kedua (internal reviewer) atau komite validasi data yang bertugas memastikan kualitas data pada saat pengukuran kinerja dilakukan.	Mengoptimalkan TIM SAKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah dalam memaksimalkan validasi data dan ketepatan dalam pengukuran capaian kinerja	Persentase Tim SAKIP yang aktif dalam Melakukan Validasi Data ulang	100%	Melakukan Validasi Data Berlapis	April, Juli, Oktober, Desember 2026	Bagian Organisasi (TIM SAKIP)	TW1 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1Xq_1HqBLwMmkH302PeGaKqvcPF6cqlvW7usp=sharing	SK TIM SAKIP Dokumentasi Rapat Tim SAKIP
4.	Mekanisme pengukuran kinerja dengan kinerja organisasi dan individu belum berjalan optimal. Pengukuran kinerja individu masih lebih banyak pada mekanisme pelaporan hasil kegiatan saja tanpa melihat hasil kinerja organisasi, sehingga penerapan pemberian reward and punishment berbasis kinerja belum dapat diimplementasikan dengan baik;	Instansi agar mendorong penerapan penilaian kinerja individu yang dikaitkan dengan penilaian kinerja organisasi. Diharapkan, penilaian kinerja tidak hanya berbasis pelaporan hasil kegiatan dan kehadiran saja, namun juga dikaitkan dengan ketercapaian kinerja organisasi. Sehingga pemberian reward dan punishment yang dilakukan lebih konkrit dan berbasis pada kinerja dan kontribusi setiap individu;	Mekanisme pengukuran kinerja organisasi dengan Kinerja individu belum dikaitkan antara satu dengan yg lain.	Membuat Surat kepada kepala OPD agar target kinerja OPD yg telah ditetapkan dalam renstra PD harus menjadi rujukan penetapan target kinerja individu secara berjenjang.	Persentase keselarasan target kinerja individu secara berjenjang dengan target kinerja perangkat daerah	100%	Membuat Surat kepada kepala OPD dan pendampingan agar target kinerja OPD yg telah ditetapkan dalam renstra PD harus menjadi rujukan penetapan target kinerja individu secara berjenjang.	Februari-maret 2026	TIM SAKIP KABUPATEN TANA TIDUNG (Bagian Organisasi)	Sudah Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1nQknaZ7v56kx08Yy_BKDeF7CPEoBn4?usp=sharing	Surat Edaran Undangan Rapat Dokumentasi Pendampingan

5.	Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara memadai untuk melakukan penyesuaian strategi, program, maupun intervensi. Proses pemantauan cenderung berhenti pada pelaporan pencapaian tanpa diikuti dengan revisi arah kebijakan atau perbaikan langkah aksi, sehingga pembelajaran dari kinerja tidak dijeramahkan menjadi perubahan strategi yang diperlukan.	Instansi perlu mewajibkan penggunaan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi dan program. Setiap pencapaian yang tidak sesuai target harus dilanjutkan dengan kebijakan penyesuaian, reposisi program, atau perubahan intervensi agar perbaikan kinerja dapat terjadi secara nyata.	Hasil evaluasi pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong percepatan pencapaian target kinerja	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian kinerja organisasi.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang diindaklanjuti dalam perbaikan strategi, kebijakan, dan program	29 OPD	Membuat Surat dan pendampingan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi strategi, kebijakan, dan program	April, Juli, Oktober, Desember 2026	TIM SAKIP KABUPATEN TANA TIDUNG (Bagian Organisasi)	TW1 Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1qvO3jpskM79jA6YRYDCCqHn36aHhW4?usp=sharing	Surat Edaran dokumentasi Pendampingan
C. PELAPORAN KINERJA												
1.	LAKIP pada tingkat perangkat daerah masih perlu perbaikan kualitas. Dimana masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum diinformasikan secara lengkap dan spesifik akan informasi perihal kendala. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja, serta alternatif Solusi untuk mencapai kinerja mendatang;	Instansi agar mewajibkan kepada setiap PD untuk memperkuat informasi akan aksi dan strategi perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk meminimalisir munculnya permasalahan kinerja yang sama di masa mendatang guna mengoptimalkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang;	Perumusan rencana aksi sebagai strategi penyelesaian masalah di level opd belum dilaksanakan secara maksimal	Pendampingan Perumusan rencana aksi kepada OPD dalam rangka penajaman strategi penyelesaian masalah di level opd.	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	Pendampingan OPD dalam penajaman strategi penyelesaian masalah	Desember 2025	Bagian Organisasi	Telah dilaksanakan Bimtek Penyusunan LAKIP yang diikuti oleh seluruh OPD pada Bulan Desember Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1UwG5G5KUKNrnIIXbK-Rbez3kKszA2?usp=sharing	Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen Kegiatan Dokumentasi
2.	Pelaporan kinerja berkala belum menyajikan kemajuan status atas rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidadaan pemburuan ini membuat sulit menilai sejauh mana tindak lanjut telah dilakukan dan apakah hambatan yang sama masih berulang tanpa penanganan.	OPD disarankan memperbarui format pelaporan berkala agar memuat kolom perkembangan perbaikan dari periode sebelumnya. Penyajian kemajuan secara konsisten akan membantu menilai efektivitas tindak lanjut dan mencegah terulangnya hambatan yang sama.;	Pelaporan kinerja berkala belum menyajikan kemajuan status atas rencana perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya.	menyempurnakan format pelaporan berkala didalam aplikasi E-SAKIP agar memuat kolom perkembangan perbaikan dari periode sebelumnya.	Aplikasi yang Telah disempurnakan	1 aplikasi	menyempurnakan format pelaporan dalam aplikasi E-SAKIP	Mei 2026	Bagian Organisasi	dalam Proses	https://drive.google.com/drive/folders/1OOGCQvYX8znvL53v7DAhXGu0UV0Gc_7?usp=sharing	SS Format yang telah disempurnakan dari Aplikasi E-Sakip KTT
3.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada kinerja yang belum sesuai dengan ekspektasi instansi	Memfaatkan informasi yang tertuang dalam LPPD maupun LAKIP seluruh PD agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja kedepan guna mendukung penyelesaian isu strategis maupun peningkatan capaian makro	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya	Mempelajari dan melakukan telaah terhadap capaian kinerja pada LAKIP dan LPPD yang telah disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan strategi dan target pada penyusunan RPJMD dan Renstra	Jumlah indikator makro yang disesuaikan	6 Indikator Makro	Melaksanakan rapat penyalarsan capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP dengan capaian Kinerja yg tertuang dalam LPPD terutama berkaitan dengan indikator makro daerah	April 2026	Bagian Organisasi, Bappeda, Bapem dan BPS	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1HIO5q612rJY9JRW_33d4t8t1TRVmd?usp=sharing	Undangan Rapat Daftar Hadir Notulen Kegiatan Dokumentasi
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL												
1.	Laporan Hasil Evaluasi Internal masih lemah kualitasnya. Laporan tidak menyajikan temuan penting yang menggambarkan akar masalah dan kinerja area yang perlu diperbaiki. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang diberikan tidak cukup tajam maupun operasional sehingga tidak dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi	Instansi perlu memperbaiki struktur dan kualitas Laporan Hasil Evaluasi Internal dengan memastikan laporan memuat temuan kritis berdasarkan analisis kinerja serta rekomendasi perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat diindaklanjuti.	Laporan Hasil Evaluasi Internal masih lemah kualitasnya.	1. Penguatan Kapasitas Tim Evaluasi Internal melalui diklat atau bimtek 2. pelaksanaan evaluasi akip internal secara mendalam.	1. Jumlah Evaluator yang mengikuti Bimtek 2. Jumlah Laporan AKIP yang terbit	1. 11 Orang 2. 1 Laporan	Bimtek	Agustus 2025, Mei - Desember 2026	Inspektorat & TIM Evaluator SAKIP	dalam Proses	https://drive.google.com/drive/folders/1qfA8lGoJ-AH4q5Os3i3wKeOUmX10cqhJH?usp=sharing	Surat Undangan Peserta Surat Undangan Narsum Dokumentasi
2.	Instansi telah memiliki sistem evaluasi internal berbasis aplikasi sebagai media dalam melaksanakan evaluasi internal AKIP. Namun sistem tersebut belum dimanfaatkan dengan baik karena sistem tersebut belum digunakan oleh APIP sebagai media evaluasi. Hal ini mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan evaluasi karena wadiah yang mengumpulkan temuan, rekomendasi, kemajuan perbaikan dan status penyelesaiannya belum berjalan optimal sehingga membuat proses pengendalian menjadi tidak terdokumentasi dengan baik dan mengurangi akuntabilitas perbaikan kinerja.	Instansi agar memanfaatkan sistem evaluasi internal yang sudah ada dengan memastikan bahwa setiap proses evaluasi AKIP internal dari mencatat seluruh temuan, rekomendasi, tindak lanjut, dan perkembangan perbaikan telah tercatat dan maksimal digunakan. Sistem ini harus menjadi rujukan utama bagi monitoring dan wajib digunakan untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi diindaklanjuti hingga selesai.	Instansi telah memiliki sistem evaluasi internal berbasis aplikasi sebagai media dalam melaksanakan evaluasi internal AKIP. Namun sistem tersebut belum dimanfaatkan dengan baik karena sistem tersebut belum digunakan oleh APIP sebagai media evaluasi.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yg sudah ada pada evaluasi AKIP Internal	1. jumlah aplikasi yang digunakan	1 aplikasi	Penggunaan aplikasi e-sakip	Juli - Desember 2026	Inspektorat & TIM Evaluator SAKIP	dalam Proses	https://drive.google.com/drive/folders/1A2JDvWq_n1n8c4j4k7VfEzh2c2H5wW?usp=sharing	Dokumentasi pengunaan aplikasi e-sakip SS hasil evaluasi di dalam aplikasi
3.	Hasil evaluasi kinerja belum digunakan sebagai dasar dalam proses penganggaran. Meskipun evaluasi menunjukkan kemampuan yang rendah, alokasi anggaran tetap sama dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan. Keterkaitan ini menjadikan belanja kurang responsif terhadap kinerja dan mengurangi efektivitas pemanfaatan anggaran untuk mendorong pencapaian sasaran hasil.	Instansi perlu mewajibkan penggunaan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar utama dalam penyusunan anggaran. Program atau kegiatan dengan capaian rendah harus ditinjau ulang alokasinya, diperbaiki desain intervensinya, atau diakhiri bila tidak efektif. Belanja yang tidak menunjukkan kontribusi terhadap kinerja tidak dapat dipertahankan tanpa justifikasi yang kuat.	Hasil evaluasi kinerja belum digunakan sebagai dasar dalam proses penganggaran.	Memfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal sebagai dasar TAPD melakukan Asistensi/verifikasi anggaran.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	Sosialisasi Hasil Evaluasi AKIP Internal Kepada TIM TAPD untuk dijadikan sebagai dasar penetapan prioritas anggaran dan kegiatan	Februari - Mei 2026	Inspektorat & TIM Evaluator SAKIP	dalam Proses	https://drive.google.com/drive/folders/1A2JDvWq_n1n8c4j4k7VfEzh2c2H5wW?usp=sharing	Surat Undangan Peserta Dokumentasi
4.	Pemahaman mengenai SAKIP masih lebih banyak dipersepsikan sebagai penyediaan aplikasi yang canggih atau penyusunan dokumen yang lengkap, bukan sebagai sistem manajemen kinerja yang memastikan penggunaan kewenangan dan anggaran menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Orientasi yang berlebihan pada teknologi dan dokumen ini esensi esensi SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas kinerja.	Instansi perlu mengarahkan kembali pemahaman bahwa SAKIP bukan sekedar aplikasi atau kelengkapan dokumen, tetapi mekanisme akuntabilitas untuk memastikan kewenangan dan anggaran menghasilkan hasil yang nyata. Semua unit kerja wajib mengutamakan substansi manajemen kinerja, bukan tampilan administrasi atau teknologi semata.	Pemahaman mengenai SAKIP masih lebih banyak dipersepsikan sebagai penyediaan aplikasi yang canggih atau penyusunan dokumen yang lengkap, bukan sebagai sistem manajemen kinerja yang memastikan penggunaan kewenangan dan anggaran menghasilkan manfaat bagi masyarakat.	Melakukan Sosialisasi manfaat SAKIP dalam meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah daerah melalui OPD	Jumlah OPD	29 OPD	Sosialisasi dan pendampingan manfaat SAKIP dalam meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah daerah melalui OPD	Februari-Maret 2026	Inspektorat & TIM Evaluator SAKIP	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/124IA7CDvnc8El0J0cYulMheOUhHEQxT?usp=sharing	Surat Undangan Peserta Dokumentasi

Link Google Drive :	https://drive.google.com/drive/folders/1mii40f7vB_oWq9C2t91Jc5UblS8e758Q
---------------------	---